

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, sektor perekonomian mengalami kemajuan yang mempengaruhi perkembangan perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Persoalan yang dihadapi oleh perusahaan juga semakin rumit terutama pada penyajian laporan keuangan. Persoalan tersebut dapat datang dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan yang berdampak pada terhambatnya perusahaan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian internal yang dapat membantu perusahaan dalam memperlancar kegiatan dan meningkatkan efektifitas perusahaan sehingga dapat meminimalisir resiko atau kesalahan dalam kegiatan perusahaan,

Sebuah instansi pemerintahan memiliki kegiatan tertentu untuk menyelesaikan tujuan jangka panjang dan jangka panjang dengan harapan instansi pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan instansi pemerintahan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, membutuhkan sumber dana yang memiliki nilai ekonomis, termasuk investasi pada aset tetap.

Aset tetap memiliki peranan penting dalam kegiatan operasional instansi pemerintahan dan memiliki nilai yang sangat berarti terutama dalam laporan keuangan neraca. Oleh sebab itu diperlukan perhatian khusus terhadap aset tetap.

Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, dengan masa manfaat atau umur ekonomi lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk

menjalankan kegiatan perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan (Mulyadi, 2018). Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 71 Tahun 2010 , “aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan,atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”.

Dalam menjalankan kegiatan operasional instansi pemerintahan, proses perolehan aset tetap memerlukan pertimbangan-pertimbangan agar sesuai dengan kebutuhan instansi dan sesuai dengan ketersediaan dana untuk perolehan aset tetap. Untuk meminimalisir kesalahan perolehan aset tetap, diperlukan perencanaan dan kebijakan apa yang akan diambil untuk memperoleh aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh dengan cara pembelian tunai, pembelian angsuran, ditukar dengan surat berharga, ditukar dengan aset tetap lainnya, dan diperoleh dari donasi (Rudianto,2018). Aset tetap yang dimiliki oleh sebuah instansi dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, kendaraan, perlengkapan kantor, dan lainnya.

Seiring berjalannya waktu, aset tetap akan mengalami penyusutan atau depresiasi (kecuali tanah). Menurut PSAP No.71 Tahun 2010 Pernyataan 07 Paragraf 53, “penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan”. Ada beberapa metode penyusutan yang dapat digunakan seperti : metode garis lurus, metode pembebanan menurun, dan metode unit produksi.

Aset tetap diperoleh dengan tujuan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, ada kalanya suatu aset tetap harus dihentikan penggunaannya karena beberapa alasan atau keadaan, seperti penjualan aset tetap, pertukaran dengan aset tetap lainnya, atau berakhirnya masa manfaat sehingga perlu diganti dengan aset tetap baru. Penghapusan aset tetap ialah penghentian pemakaian aset tetap dengan cara dijual, ditukarkan atau rusaknya aset tetap sehingga semua rekening yang berhubungan dengan aset tetap tersebut harus dihapuskan (Zaki Baridwan, 2011).

Pencatatan akuntansi pada aset tetap harus mengikuti prinsip akuntansi yang telah ditetapkan agar pencatatannya dapat dipercaya oleh pihak internal dan pihak eksternal instansi dan dapat menjadi pedoman dalam menilai keberhasilan instansi dalam mengelola aset tetap. Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintahan harus dilakukan pengendalian dan pengontrolan. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir masalah yang timbul atas pengadaan dan pemakaian aset tetap tersebut.

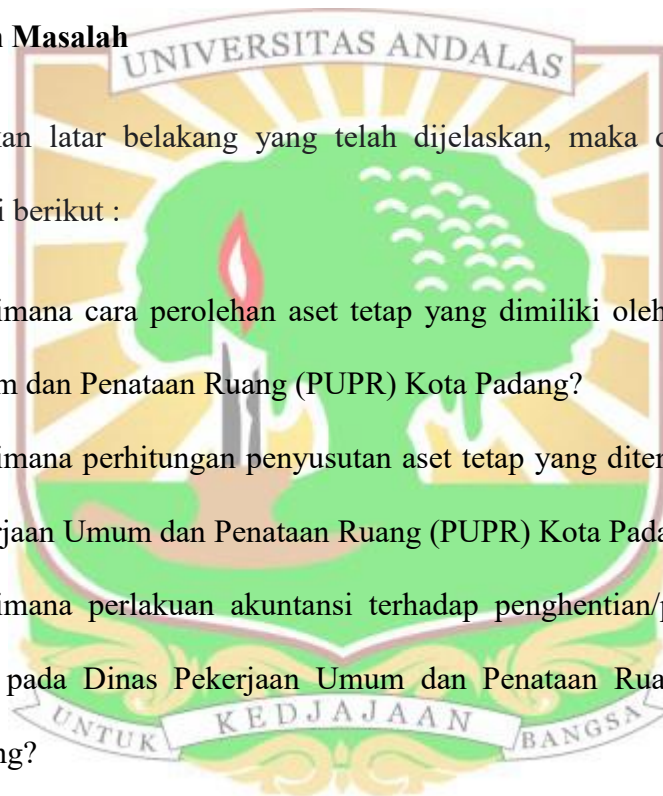
Setiap instansi memiliki jenis dan jumlah aset tetap yang berbeda-beda. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, aset tetap diklasifikasikan kedalam 6 kelompok yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Dinas PUPR Kota Padang tentunya memerlukan aset tetap ini untuk menunjang dan membantu kelancaran kinerja supaya dapat mewujudkan kinerja yang maksimal dalam melayani kepentingan publik. Selain itu, juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Melihat pentingnya peranan aset tetap atas kewajaran penilaian dalam laporan keuangan, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan memahami lebih lanjut mengenai aset tetap dan pencatatan akuntansi terhadap aset tetap. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas topik yang berjudul **“PERLAKUAN ASET TETAP BERWUJUD PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara perolehan aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang?
2. Bagaimana perhitungan penyusutan aset tetap yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang?
3. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap penghentian/penghapusan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang?
4. Bagaimana penyajian aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang?



1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui cara perolehan aset tetap yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang.
2. Untuk memahami metode penyusutan aset tetap yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang
3. Untuk mengetahui cara penghentian atau penghapusan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang
4. Untuk mengetahui penyajian aset tetap pada laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang

1.4 Manfaat Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
2. Sebagai media untuk menambah informasi dan pengetahuan mengenai akuntansi aset tetap
3. Menambah wawasan dan mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan dan diterapkan ke praktek sesungguhnya di dunia kerja.
4. Dapat mengetahui langsung sistem dan tata cara yang diterapkan pada instansi pemerintah mengenai perlakuan akuntansi aset tetap.

5. Sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan sejenis dimasa yang akan datang

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Penulis memilih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang yang beralamat di Jl. Ujung Gurun No.2, Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang sebagai tempat magang. Kegiatan magang ini dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai Jumat yang dimulai pukul 07.30 – 16.00 selama 40 (empat puluh) hari kerja.

1.6 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data

- a. Studi pustaka

Studi pustaka atau kepustakaan adalah rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed, 2013). Dalam metode ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, arsip, dokumen, catatan, dan laporan penelitian atau jurnal-jurnal terdahulu.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara mengumpulkan data penelitian yang dilakukan dengan komunikasi dua arah untuk mendapatkan informasi dari informan terkait. Wawancara adalah kejadian atau proses

interaksi antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung atau bertanya langsung mengenai objek yang diteliti (Yusuf, 2014). Informasi utama dari wawancara ini adalah supervisor bagian keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang. Wawancara dilakukan secara langsung (*face to face*) pada saat penulis melakukan kegiatan magang yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2023 sampai 6 Maret 2023. Peneliti juga mendapatkan informasi dibantu dengan percakapan melalui Whatsapp yang dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung.

2. Metode analisis data

Sugiyono (2018) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (p. 482). Setelah data-data terkumpul, penulis selanjutnya menganalisis data tersebut menggunakan teori-teori perhitungan aset tetap untuk melakukan analisis data, peneliti memerlukan usaha pemusatan dan pengerahan tenaga fisik dan pikiran sendiri.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan “PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA PADANG” terdiri atas V (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori yang berkaitan dengan pengertian dan klasifikasi aset tetap, karakteristik aset tetap, perlakuan akuntansi terhadap aset tetap, dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan.

BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang. Penjelasan ini berisikan tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan fungsi instansi, dan susunan organisasi.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini berisikan hasil magang selama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang berkaitan dengan penerapan akuntansi aset tetap.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini memberikan simpulan dan saran terhadap permasalahan yang terjadi berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

